

Iman Tauhid Islam) dalam rangka pemantapan iman dalam bermuamalah selanjutnya diadakan pertemuan serta dialog di Islamic Centre Surabaya tanggal 5 Pebruari 1992 dengan menghadirkan Drs. Maman W. Natapermadi selaku Direktur Pembiayaan BMI dan Drs. Imhar Burhanuddin selaku Direktur Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Bank Syari'ah.

Hasil dari pertemuan di atas adalah dengan ditandatangani surat pernyataan kesediaan pelatihan, sebagai Komisaris oleh Drs. Mamam W. Natapermadi berikut surat kuasanya dan Drs. Imhar Burhanuddin menyatakan kesediaannya sebagai Project Officer untuk mempercepat pendirian. HMY Bambang Sujanto (Ketua PITI Jawa Timur) bersedia menerima kuasa sebagai Komisaris Utama dengan catatan apabila BPR Syari'ah yang dimaksud telah berjalan dengan baik, jabatan Komisaris Utama akan diserahkan kepada yang lebih profesional.

Pada kesempatan tersebut telah disepakati pendirian beradâ di Kabupaten Sidoarjo dan dimulai penyetoran modal bagi para pemegang saham untuk memenuhi ketentuan maksimum Rp 50.000.000,-. Pada tanggal 19 Juli 1993 diperoleh ijin prinsip dari Menteri Keuangan No. S-108/MK.17/1993, kemudian dikuatkan dengan keputusan Menteri Kehakiman No. C2 10924 HT.01.01Th.1993 tertanggal 18 Oktober 1993 berisi tentang persetujuan pendirian, maka telah resmi berdiri BPR Syari'ah dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat

Salah satu hambatan tersebut misalnya tidak adanya modal usaha yang berupa uang atau disebabkan oleh lemahnya pengelolaan (managemen) sehingga mereka sulit untuk bersaing dengan pengusaha besar. Hal seperti ini banyak terjadi di masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Melihat kenyataan tersebut maka dirintislah pendirian BPR yang berdasarkan atas syari'ah Islam seperti halnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah ini, dalam mendapatkan modal usaha (pembiayaan) yang berupa uang PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah menentukan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku serta peraturan yang harus dilaksanakan untuk memperoleh modal usaha tersebut. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Syarat-syarat (ketentuan) mendapatkan modal (pembiayaan).

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah dalam memberikan modal usaha (pembiayaan) kepada masyarakat yang membutuhkan modal (pembiayaan) menentukan beberapa syarat bagi pemohon. Syarat-syarat tersebut ialah :

- a. Muslim
- b. Domisili di wilayah kerja PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah.
- c. Mempunyai bidang usaha.

- a. Nama lengkap
Tempat dan tanggal lahir (umur)
Tempat tinggal
- b. Pekerjaan/usaha
 - Utama
 - Sampingan
- c. Nama lengkap istri
Pekerjaan/usahanya
- d. Riwayat pinjaman/pembiayaan (pada masa lalu)
- e. Jenis yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan ini
- f. Besarnya yang diminta
- g. Jangka waktu pengembalian yang diminta
- i. Uraian tentang alasan/latar belakang permohonan pembiayaan
- j. Disamping utama berupa proyek yang dibiayai jaminan apa yang dapat disediakan.

Disamping hal tersebut, pada pembiayaan murabahah dan Bai' u Bitsaman ajil juga terdapat formulir untuk harga jual dan harga beli.

Dan jika pemohon tidak dapat datang sendiri maka harus menggunakan surat kuasa menjaminkan. Surat perjanjian tersebut di atas setelah ditandatangani kemudian diserahkan kepada pengurus untuk penerimaan uang modal dan keperluan administrasi.

Dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan aqadnya dilakukan dengan lisan terlebih dahulu yaitu wawancara antara pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah dengan pemohon pembiayaan, baru setelah itu dikuatkan dengan tertulis dan apabila sewaktu-waktu diketahui penerima modal menemui masalah terhadap modal yang sedang dijalankannya maka dapat langsung berkonsultasi kepada pengurus PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah dan apabila yang menjalankan modal mengalami kerugian maka pihak bank melihat terdapatnya unsur sengaja atau tidak, yang dilakukan account Officer, jika benar-benar terjadi kerugian maka Bank membatalkan keuntungan yang diperolehnya seperti dalam kesepakatan semula dan masa pinjaman dapat diperpanjang. Untuk kelancaran usaha juga dilakukan pengawasan lapangan oleh Pengurus PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah, hal ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah uang modal (pembiayaan) yang diterima oleh peminjam modal itu benar-benar digunakan usaha apa tidak serta untuk melihat perkembangannya, sesuai dengan isi surat perjanjian yang telah disepakati.

(Wawancara dengan Kabag. Operasional PT. BPR Syari'ah Bakti Makmur Indah, Bapak Imam Munadjat.)

membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan. dibagi enam golongan.

- a. Golongan I, bunga 9% setahun untuk pengadaan penyaluran beras / gabah / jagung oleh BUUD/KUD.
- b. Golongan II, bunga 12% setahun untuk penanaman padi dan palawija dalam Bimas dan Imnas. Pengumpulan dan penyaluran garam oleh BUUD/KUD dan PN garam, pabrik terigu, ekspor dan perusahaan eksportir produksi import, penyaluran pupuk dan obat hama, barang-barang diluar pangan dalam rangka bantuan luar negeri, pengumpulan dan penyaluran hasil tani, peternakan, perikanan oleh BUUD / KUD dan koperasi, usaha pertanian rakyat dan kerajinan rakyat, pemeliharaan ternak unggas dan perikanan rakyat.
- c. Golongan III, bunga 13.5% setahun untuk modal kerja industri dan jasa-jasa, produksi lainnya, import dan penyaluran barang-barang yang diawasi, pembiayaan persediaan gula. perdagangan dalam negeri termasuk antar pulau proyek-proyek INPRES yang dibiayai pemerintah daerah dan perumahan sederhana.
- d. Golongan IV, bunga 15% setahun untuk kontraktor, dan yang tidak termasuk dalam golongan III.

- e. Golongan V, bunga 18% setahun untuk kredit Import dan penyaluran barang-barang import yang tidak termasuk penyaluran pupuk, obat hama dan barang-barang diluar pangan dalam rangka bantuan luar negeri dan penyaluran barang-barang yang diawasi.
- f. Golongan VI, bunga 21% setahun untuk yang tidak termasuk Golongan I sampai dengan V.
2. Investasi, yaitu kredit jangka menengah/panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal dengan jangka waktu 10 tahun termasuk masa tenggang waktu 4 tahun hal ini untuk bank-bank umum pemerintah, sedang untuk bank pembangunan Indonesia jangka waktu tersebut lamanya 15 tahun termasuk masa tenggang 6 tahun. Kredit investasi dibagi dalam 4 golongan yaitu :
- a. Golongan I, memperoleh jumlah kredit sampai dengan Rp 75.000.000,- suku bunga 10.5% pertahun.
- b. Golongan II, diatas Rp 75.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- suku bunga 12% pertahun.
- c. Golongan III, diatas Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- suku bunga 13.5% pertahun.

- d. Golongan IV, diatas Rp. 500.000.000,- suku bunga 13,5% pertahun.

Masa tenggang yang ditetapkan tersebut jika terjadi penangguhan pembayaran bunga, maka bunga yang timbul selama masa tersebut ditambahkan kedalam hutang pokok begitu juga untuk keterlambatan angsuran (Thomas Suyatno et al, 1991 : 26-42).

Untuk BPR (umum) sistem permodalannya yaitu untuk modal awal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1992 yaitu Rp. 50.000.000,- (Wasis, 1993 : 103).

Yang termasuk dalam pengertian BPR adalah Bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan dalam sistem permodalannya terdapat batas-batas tugas yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima tabungan/simpanan
- b. Menerima simpanan dalam bentuk deposito
- c. Tidak diperkenankan ikut dalam lalu lintas giro
- d. Menerima dan memberikan kredit kepada pedagang-pedagang dipasar/penduduk desa. Dengan ketentuan:
 - 1). Tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun.
 - 2). Barang jaminan tidak dengan sendirinya terjual kepada bank jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya.

- 3). Dalam menetapkan suku bunga hendaknya berpedoman kepada suku bunga yang berlaku, sedangkan untuk biaya administrasi, provisi dan lain-lain tidak boleh melebihi 2.5% dan dipungut hanya sekali saja, yaitu pada waktu pemberian kredit.
- 4). Tidak diperkenankan menetapkan jangka waktu cicilan kurang dari satu minggu.
- 5). Tidak diperkenankan melakukan praktek penggadaian (Thomas Suyatno, 1994 : 27 - 28).

Dari hal tersebut dapat diketahui perbedaan sistem permodalan antara BPR Syari'ah dengan Bank Konvensional dan BPR (umum) yaitu :

Pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah adalah :

1. Berdasarkan pada hukum positif dan hukum syari'ah Islam.
2. Modal diperoleh dari saham, simpanan/tabungan dan juga deposito kemudian disalurkan melalui pembiayaan.
3. Hubungan dengan nasabah merupakan hubungan kemitraan.
4. Penentuan besarnya keuntungan atau bagi hasil pada waktu akad dengan berpedoman pada untung dan rugi.
5. Bagi hasil atau pembagian laba tergantung keuntungan, jika tidak mendapat keuntungan maka kerugian ditanggung bersama.
6. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah keuntungan.
7. Melakukan investasi yang halal-halal saja.

8. Pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah.

Sedangkan pada Bank Konvensional dan BPR (umum) yaitu :

1. Berdasarkan hukum positif
2. Modal merupakan modal sendiri dan modal yang digolongkan sebagai senior capital.
3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur dan kreditur.
4. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung dan rugi.
5. Bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mengetahui pihak nasabah untung atau rugi.
6. Jumlah bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat.
7. Melakukan Investasi yang halal dan haram.
8. Tidak terdapat dewan seperti halnya dewan pengawas syariah.